



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
17. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa

yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
27. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.

30. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
33. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
35. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
39. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi

pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

40. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. teknis evaluasi Rancangan APBDesa; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018
BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019.

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Terkait dengan target pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di desa melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka di desa melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, dapat dilakukan melalui beberapa langkah alternatif, diantaranya:

1. belanja infrastruktur desa sebagian dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui padat karya;
2. pelatihan keterampilan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna serta membuka akses permodalan bagi wirausaha baru;
3. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
4. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
7. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
8. pengembangan benih lokal;
9. pengembangan ternak secara kolektif;
10. pengembangan Desa Wisata; dan
11. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Terkait dengan target makro pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sasaran yang harus menjadi fokus peningkatan adalah komponen yang mempengaruhi IPM, yakni tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan tingkat daya beli masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus mulai diarahkan ke peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni aspek pendidikannya, kesehatannya, dan keberdayaannya secara ekonomi. Pada aspek pendidikan pemerintahan desa diharapkan mampu bersinergi dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, diantaranya dengan mendukung penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, diantaranya paket A, Paket B dan Paket C bagi penduduk diatas usia 15 tahun yang masih buta huruf atau belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Pada aspek kesehatan, pembangunan pemerintah desa diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara mendorong kepesertaan masyarakat ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hal ini dalam rangka mendukung target pemerintah pusat mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2019.

Di samping itu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan pemerintah desa juga diarahkan untuk mendukung target-target pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga menuju desa Open Defecation Free (ODF) atau tidak buang air sembarangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
5. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6. pendayagunaan sumber daya alam;
7. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
8. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
9. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.

7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa).

2) Hasil Aset

Hasil Aset adalah seluruh aset Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa (sumbangan masyarakat Desa), baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan.

4) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa. Sumber pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

b. Transfer.

1) Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besarannya Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besarannya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten.

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Lebak.

c. Pendapatan Lain

1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

Dapat dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

- yang diterima oleh pemerintah Desaesa berupa dana tunai.
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) Bunga bank; dan
 - 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan operasional pemerintahan Desa;
 - 5) Penyediaan tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 7) Penyediaan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) Bidang diantaranya :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;

Penghasilan Tetap Kepala Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kabupaten Lebak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penghasilan tetap Kepala Desa setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.500.000,- setiap bulannya;
- Tunjangan Jabatan Kepala Desa setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya;
- Tunjangan Hari Tua bagi Kepala Desa setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya.

b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;

Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kabupaten Lebak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Setinggi-tingginya adalah :
 - Penghasilan Tetap Sekretaris Desa non PNS setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.625.000,- setiap bulannya;
 - Penghasilan Tetap Kepala Urusan/Kepala Seksi setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.750.000,- setiap bulannya;
- Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang sudah memiliki Nomor Register Perangkat Desa dan telah dilantik oleh kepala desa;
- Selain mendapatkan penghasilan diatas, Perangkat Desa juga dapat diberikan Tambahan Penghasilan bagi Perangkat Desa dengan mempertimbangkan:
 - Wiyata Bhakti 2 s.d. 5 Tahun Rp. 100.000,- per bulan;
 - Wiyata Bhakti 6 s.d. 10 Tahun Rp. 200.000,- per bulan;
 - Wiyata Bhakti lebih dari 10 Tahun Rp. 300.000,- per bulan;
 - Pendidikan Formal D3 Rp. 50.000,- per bulan;
 - Pendidikan Formal S1 Rp. 100.000,- per bulan;
 - Pendidikan Formal S2 Rp. 150.000,- per bulan;
 - Sertifikat yang diperoleh karena telah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan pada Tahun 2018 minimal 3 hari atau 24 jam pelajaran minimal

berkualifikasi Baik dengan nomor registrasi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rp. 100.000,- per bulan per sertifikat;

- Sertifikat ujian kompetensi atau ujian pengetahuan dan keterampilan teknik, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang berbadan hukum dengan susunan tim penguji terdiri unsur Pemerintah Daerah dan unsur akademisi, Rp. 200.000,- per bulan per sertifikat;
- Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas juga dapat diberikan kepada Perangkat Desa yang berstatus PNS dengan ketentuan telah mempunyai masa bhakti lebih dari 6 (enam) tahun dan telah diangkat kembali menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Tunjangan Hari Tua bagi Perangkat Desa (Non-PNS) setinggi tingginya Rp. 200.000,- setiap bulannya.

c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Dipergunakan untuk penyediaan jaminan sosial (khususnya untuk iuran BPJS Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBDesa selain dari pengelolaan Tanah Kas Desa. Iuran bagi Peserta yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

- Tunjangan Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi Kepala Desa adalah sebesar Rp. 175.000,- (5% x Siltap di atas UMK), dengan ketentuan 3% sebesar Rp. 105.000,- dibayar oleh pemberi kerja dan 2% sebesar Rp. 70.000,- dibayar oleh peserta;
- Tunjangan Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi Sekretaris Desa adalah sebesar Rp. 131.250,- (5% x Siltap di atas UMK), dengan ketentuan 3% sebesar Rp. 78.750,- dibayar oleh pemberi kerja dan 2% sebesar Rp. 52.500,- dibayar oleh peserta;
- Tunjangan Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi Kaur dan Kasi adalah Rp. 125.000,- (5% x Siltap di bawah UMK), dengan ketentuan 3% sebesar Rp. 75.000,- dibayar oleh pemberi kerja dan 2% sebesar Rp. 50.000,- dibayar oleh peserta;
- Tunjangan Asuransi Kecelakaan dan Meninggal Dunia (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal Rp. 20.000,- per-bulan atau sesuai dengan ketentuan.

d) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa;

Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, misalnya untuk :

- Belanja penyediaan ATK (sesuai dengan kebutuhan);

- Honorarium Petugas yang terkait dengan operasional Pemerintah Desa;
 - Staf Administrasi Keuangan Desa setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya.
 - Insentif Jaga/Raksa Desa setinggi-tingginya sebesar Rp. 750.000,- setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 4 (empat) orang;
- Perlengkapan perkantoran;
- Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya;
- Perjalanan Dinas;
- Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet;
- Majalah/Surat Kabar;
- Pos dan Giro;
- Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Desa.

e) Penyediaan Tunjangan BPD;

Kegiatan ini mencakup penyediaan tunjangan BPD.

f) Penyediaan Operasional BPD;

Termasuk dalam kegiatan ini adalah Penyediaan Operasional BPD, misalnya untuk :

- ATK (sesuai kebutuhan);
- Honorarium Petugas/Operator/Tenaga Staf BPD;
 - Insentif Staf Sekretariat BPD (1 Orang) setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- setiap bulan ;
- Perjalanan Dinas;
- Perlengkapan Perkantoran;
- Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut BPD dan Atributnya;
- Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet;
- Majalah/Surat Kabar;
- Pos dan Giro. Dan Lain-lain.

Besaran anggaran BPD (Penyediaan Tunjangan BPD ditambah Penyediaan Operasional BPD) paling tinggi sebesar 10% dari jumlah Beban Tetap Anggaran.

g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

- Insentif Ketua RW setinggi-tingginya Rp. 200.000,- setiap bulannya, dan Insentif Sekretaris RW Setinggi-tingginya Rp. 75.000,- ;
- Insentif Ketua RT setinggi-tingginya Rp. 200.000,- setiap bulannya, dan Insentif Sekretaris RT Setinggi-tingginya Rp. 75.000,-.

h) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Lainnya seperti: Penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang berasal dari pengelolaan tanah Kas Desa (Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP 47/2015); Pemberian Tali Asih untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah Kas Desa atau Bantuan Keuangan Khusus (Pasal 13 Permendagri 20/2018) atau Operasional lain yang terkait dengan alokasi Bantuan Keuangan Khusus. Sepanjang

diatur lebih lanjut oleh Perbup. Kegiatan tambahan ini diluar perhitungan 30% untuk operasional perkantoran.

- 2) **Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.**
 - a) **Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;**

Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan/Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan berupa Penyediaan Modal Peralatan (Mebeulair, Komputer, Dapur dan lain-lain), Kendaraan, dan Mesin yang terkait dengan pengadaan sarana perkantoran.
 - b) **Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;**

Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran (Taman di Kantor, Ruang Pelayanan, dan lain-lain), dapat berupa Cat Ulang, perbaikan ringan, dan lain-lain. Jumlah Anggaran di bawah 30% dari nilai aset.

Penganggaran sebagai mana poin a dan b diatas dilaksanakan sepanjang memiliki sumber dari selain DD.

- 3) **Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.**
- 4) **Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.**
 - a) **Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;**

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau pra Musyawarah Perencanaan Desa yang digunakan untuk perencanaan/Pembahasan APBDes yang bersifat reguler. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes).

 - Anggaran Musyawarah Desa maksimal sebesar Rp. 4.250.000,- untuk 1 (satu) kali Kegiatan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit diikuti oleh peserta rapat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat;
 - Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Desa maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-.
 - Rapat Paripurna.
 - b) **Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;**

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa antara lain Musdes Sosialisasi, Musdes Persiapan, Musdes Pertanggungjawaban, Musdes Serah Terima Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Mekanisme Swakelola dengan Pola Padat Karya, Kegiatan Usaha ekonomi Produktif

dan Pembentukan, Pembahasan Proposal Usaha dan Pertanggungjawaban BUMDesa.

Anggaran Musyawarah Desa maksimal sebesar Rp. 4.250.000,- untuk 1 (satu) kali Kegiatan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit diikuti oleh peserta rapat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

c) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Kegiatan ini mencakup proses penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat), misal untuk rapat tim kecil, konsultasi dan pelaporan, serta pengunggahan ke media informasi, dan lain-lain.

d) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan koordinasi atau kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa baik yang antar desa dalam 1 kecamatan, antar kecamatan atau antar kabupaten, serta pihak ketiga.

Pembentukan dan atau pengelolaan kesekretariatan BKAD setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-.

e) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;

Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pelaksanaan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa), dan lain-lain.

Termasuk juga Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan anggaran maksimal Rp. 40.000.000,-.

Penetapan Anggaran Pemilihan BPD dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan BPD melalui Pemilihan di wilayah desa setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,-.

5) Sub Bidang Pertanahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDesa/RKPDesa dan/atau hasil musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

1) Sub Bidang Pendidikan.

a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang menjadi milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas tertentu di desa) yang menjadi kewenangannya. Dianggarkan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBDesa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst).

Insentif Bulanan Tenaga Pendidik Paud sebagai berikut:

- S1 PAUD/Psikolog Setinggi-tingginya Rp. 500.000,-;
- S1 Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 450.000,-;
- S1 Non Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 400.000,-;
- D.III Keguruan dan D.II Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 400.000,-;
- D.III Non Keguruan dan D.II Non Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 350.000,-;
- SLTA/Sederajat Setinggi-tingginya Rp. 300.000,-

b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;

Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang bukan milik Desa (milik kelompok masyarakat /yayasan/ormas tertentu di desa) berupa kegiatan penyerahan barang yang diberikan kepada masyarakat (misal APE, bahan bangunan, atau sarana PAUD), tidak diperkenankan diberikan berupa uang tunai (Penganggaran diberikan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBDesa).

c) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/ Madrasah Non-Formal yang menjadi Milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat /yayasan /ormas tertentu di desa).

2) Sub Bidang Kesehatan.

a) Penyelenggaraan Posyandu;

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Posyandu baik Posyandu Balita/Lansia atau Posyandu milik desa lainnya. (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu).

- Insentif Kader Posyandu setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,- setiap bulannya;
- Belanja bendera ibu hamil, pengadaan pakaian seragam dan belanja lainnya.

b) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Desa. Atau

berbentuk Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana dan pengadaan Sarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Desa.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Desa yang baru atau Peningkatan/Pengerasan Jalan/Prasarana atas Jalan Desa yang telah ada.

b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang Baru) atau Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang telah ada.

c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Persawahan yang baru atau Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Usaha Tani/Persawahan yang telah ada.

d) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jembatan Milik Desa yang baru atau Peningkatan/Pengerasan atas Jembatan Milik Desa yang telah ada.

e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Prasarana Jalan yang baru berupa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain atau Peningkatan atas Prasarana Jalan yang telah ada.

f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Bangunan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan yang baru atau Peningkatan atas Bangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan yang telah ada.

g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;

Kegiatan ini mencakup penyediaan Embung milik Desa yang baru atau Peningkatan/Pengerasan Embung milik Desa yang telah ada.

4) Sub Bidang Kawasan Permukiman.

a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;

Kegiatan ini berupa bantuan stimulan dalam bentuk barang/material, dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan kondisi bangunan Rusak Ringan dapat dianggarkan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- dan Rusak Sedang setinggi-tingginya Rp. 7.500.000,- serta Rusak Berat setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,-.

b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).

c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan) (pipanisasi, dll).

d) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).

5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

a) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup desa yang menjadi kewenangannya. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugas, operasional perkantoran atau Makan minum serta Belanja Modal yang diperuntukkan dalam pengelolaan;

➤ Honor Mantri Tani Desa setinggi-tingginya Rp. 1.250.000,- setiap bulannya selama 12 bulan;

6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll). Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional perkantoran, dan Makan minum.

b) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas,

operasional perkantoran, Makan minum atau Belanja Modal peralatan elektronika/studio/Komputer atau Belanja Modal Jaringan/Instalasi;

- Honor petugas komunikasi dan informasi (1 orang) setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya.

7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

8) Sub Bidang Pariwisata.

a) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa yang telah ada.

b) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan pariwisata tingkat desa. Misalnya pengadaan/pembelian tanah untuk prasarana pariwisata baru yang dalam tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD).

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;

Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll).

b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);

Kegiatan ini mencakup pelatihan tenaga keamanan/ketertiban dalam rangka ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

c) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;

Kegiatan ini mencakup pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana skala lokal desa, untuk masyarakat dan tenaga keamanan/ketertiban, dll.

d) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;

Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyediaan Pos Kesiapsiagaan bencana skala Desa berupa pembangunan pos, pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll (Pembangunan maupun pelaksanaan jika dimungkinkan dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pos keamanan desa, sehingga tidak tumpang tindik dalam pelaksanaan).

- e) **Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;**
Dialokasikan guna membantu aparaturnya desa dan masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, dll.
 - f) **Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;**
Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat, dll. Dapat dilakukan di Desa atau dengan pola pengiriman peserta.
- 2) **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.**
- a) **Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;**
Kegiatan ini mencakup memberikan pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa.
 - b) **Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;**
Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dll.
 - c) **Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;**
Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/upacara terkait Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan di desa, dll.
 - d) **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;**
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa. Jumlah anggaran maksimal 30% dari nilai aset.
 - e) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.**
Kegiatan ini mencakup pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa yang telah ada. Jumlah anggaran maksimal 30% dari nilai aset.
- 3) **Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.**
- a) **Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;**
Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dll.
 - b) **Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;**
Kegiatan ini mencakup memberikan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll), dll.

- c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;**
Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/Kepemudaan dan Olahraga di tingkat desa, dll.
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;**
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa. Jumlah anggaran maksimal 30% dari nilai aset.
- e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;**
Kegiatan ini mencakup pembangunan/pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa yang telah ada.
- f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;**
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga, dll.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.**
- a) Pembinaan lembaga adat;**
Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat.
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Lembaga Adat atau sebutan lain.
- b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;**
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD atau sebutan lain.
- c) Pembinaan PKK;**
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan PKK, dll
Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain:
- Belanja Barang jasa
 - ATK;
 - Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa;
 - Seragam Anggota TP-PKK;
 - Seragam Lainnya;
 - Pembuatan Papan Data;
 - Pembuatan Plang TP-PKK Desa;
 - Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Desa;
 - Pengadaan Sarana Publikasi;
 - Dokumentasi Kegiatan;
 - Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi;
 - Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Desa;
 - Penunjang keikutsertaan PKK Tk. Desa ke Tk. Kecamatan dan ke Tk. Kabupaten.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa yang baru atau rehabilitasi/peningkatan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).

b) Bantuan Perikanan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan Bibit/perengkapan (Pakan), yang bersifat modal bergulir stimulan bersyarat.

c) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;

Kegiatan ini mencakup pemberian Pelatihan atau Bimbingan teknis atau tahap Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Masyarakat, baik umum maupun nelayan.

2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan peralatan/Bibit/perengkapan (pupuk) untuk bidang pertanian, yang bersifat modal bergulir stimulan bersyarat.

b) Peningkatan Produksi Peternakan;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa Penyediaan bantuan peralatan/bahan bangunan/Bibit/perengkapan (pakan) untuk bidang peternakan, yang bersifat modal bergulir stimulan bersyarat.

c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;

Kegiatan ini mencakup pembangunan baru atau pengelolaan serta pemeliharaan Lumbung Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.

d) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG bidang pertanian dan atau peternakan kepada Masyarakat umum atau khusus pada petani/peternak.

3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Kepala Desa, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.

b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Perangkat Desa, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.

c) Peningkatan kapasitas BPD;

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas BPD, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.

Kegiatan sebagaimana poin a, b, c, dianggarkan dari sumber selain DD.

4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di Desa, diutamakan pelatihan bidang usaha ekonomi produktif.

b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/ Penyuluhan tentang Perlindungan Anak di Desa.

5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

a) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian;

Kegiatan ini mencakup mengadakan teknologi tepat guna yang dimiliki oleh Desa untuk menunjang ekonomi pedesaan non-pertanian, dialokasikan ke Penyediaan sarana/prasarana untuk teknologi tepat guna di Desa.

6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

a) Pembentukan BUM Desa;

Kegiatan ini mencakup rapat-rapat dan koordinasi pembentukan awal BUMDesa. dll (Keterangan: Untuk penyertaan Modal dimasukkan dalam Pembiayaan).

b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;

Kegiatan ini mencakup pelatihan pengelolaan BUMDesa.

7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

a) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Modal Pembangunan Pasar atau Kios Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar atau Kios Milik Desa yang sudah ada.

b) Pengembangan Industri kecil level Desa;

Kegiatan ini mencakup pelatihan pengembangan industri kecil level desa dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri level desa, bersifat modal bergulir stimulan bersyarat.

c) Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;

Kegiatan ini mencakup Pembentukan, Fasilitasi, Pelatihan, Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif misal: pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll). Selain itu dapat dianggarkan untuk Bantuan Modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:

1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana.

a) Penanggulan Bencana.

Kegiatan ini mencakup upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial berupa Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana. Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana ialah evakuasi tingkat pertama, dapat berupa bantuan langsung berupa barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan di desa yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bantuan tersebut dapat dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dapat dianggarkan bagi Desa yang telah dinyatakan rawan bencana oleh Pemerintah Daerah.

2) Sub Bidang Keadaan Darurat.

a) Keadaan Darurat.

Kegiatan ini mencakup upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.

a) Keadaan Mendesak.

Kegiatan ini mencakup upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Selanjutnya Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut:

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa

1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pendidikan
2	2		Sub Bidang Kesehatan

2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll)
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan

4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

Kegiatan Belanja sesuai 5 (lima) Bidang dimaksud terdiri atas jenis belanja:

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa;
- c. Modal; dan
- d. Tak Terduga.

Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pegawai

Jenis belanja pegawai antara lain dianggarkan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan Pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

b. Barang / Jasa

Belanja Barang/Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

- 1) alat tulis kantor;
- 2) benda pos;
- 3) bahan/material;
- 4) pemeliharaan;
- 5) cetak/penggandaan;
- 6) sewa kantor desa;
- 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- 8) makanan dan minuman rapat;
- 9) pakaian dinas dan atributnya;
- 10) perjalanan dinas;
- 11) upah kerja;
- 12) honorarium narasumber/ahli;
- 13) operasional Pemerintah Desa;
- 14) pemeliharaan sarana prasana Desa;
- 15) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 16) operasional BPD;
- 17) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- 18) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

Selanjutnya Belanja Desa diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut:

DAFTAR KODE REKENING BELANJA

5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator

5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90- 99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90- 99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90- 99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90- 99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90- 99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan

5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kecamatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa, termasuk untuk penyertaan modal BUMDesa melalui pengembangan usaha BUM Desa berupa pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga serta untuk pengelolaan Bank Sampah.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

KODE REKENING PEMBIAYAAN

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa

6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

D. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;
2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupati.

E. Teknis Evaluasi Rancangan APBDes

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah di delegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

1. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

- a) Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
- b) Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- c) Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- d) Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

2. EVALUASI

a) Persiapan Evaluasi

- 1) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi yaitu:

- Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Tim Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa sebagaimana dimaksud angka 1) terdiri dari:
 - Ketua : Camat
 - Sekretaris : Kasi Pemerintahan dan Pertanahan

- Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan/atau UPT Kecamatan terkait.
 - Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
 - Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Dokumen Evaluasi
- Dokumen Utama
 - Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
 - Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - Disampaikan oleh Desa
 - ✓ Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - ✓ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - ✓ Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
 - ✓ Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDesa, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, dll).
 - Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - ✓ Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - ✓ Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - ✓ Peraturan Bupati tentang Dana Desa;
 - ✓ Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
 - ✓ Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - ✓ Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

b) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
- Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

- Kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa.
- Langkah-langkah evaluasi:
 - Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi
 - Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen dan
 - Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s.d. 4.

Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

2) Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja sebagai berikut :

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Tahun Angg. :

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBdesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas :					
.....					
.....					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBdesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
.....					
.....					
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdesa terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Pendapatan					
.....					
.....					
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2.	Semua Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa/ Pedoman Penyusunan APBDesa	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)				
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling				

	banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintah Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga				
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.			Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDesa	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.			Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDesa	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahhalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/ HPS)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Belanja					
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan perturan perundang- undangan				
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3.	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan			Peraturan Desa tentang Pembentukan	

	peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi kelayakan usaha			BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran Sebelumnya				
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Pembiayaan					
.....					
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi					
.....					
.....					

....., 2018

Tim Evaluasi APBDes Kecamatan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1 (Camat)	Penanggung Jawab	1
2 (Sekmat)	Ketua	2
3 (Kasi Pem)	Sekretaris	3
4 (Kasi Ekbang&Kesra)	Anggota – 1	4
5 (Kasi Pelum)	Anggota – 2	5
6 (Kasi Trantib)	Anggota – 3	6
7	Anggota – 4	7
8	Anggota – 5	8

c) Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan (b) evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan Review Evaluasi.

Hasil Review Evaluasi disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat. Kepala Desa melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota BPD untuk menginformasikan Hasil Review Evaluasi. Desa melakukan inputing data APBDesa atau Perubahan APBDesa kedalam Aplikasi Siskeudes dan mendistribusikan kepada Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 5 (lima) rangkap.

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDDES TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN**

Foto - 1

Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran
2019 antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk.
Kecamatan

Foto - 2

Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran
2019 antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk.
Kecamatan

Foto - 3

Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran
2019 antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk.
Kecamatan

F. Hal-Hal Khusus Lainnya

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin. Dengan demikian rumusan kegiatan dalam APBDesa yang bersumber dari Dana Desa terdiri dari Kegiatan Ekonomi Produktif – Usaha Ekonomi Masyarakat, Usaha Ekonomi Produktif – Usaha Ekonomi Desa, kesehatan, pendidikan anak usia dini, peningkatan kapasitas masyarakat, musyawarah desa dan pembangunan sarana prasarana desa yang mendukung usaha ekonomi produktif.
2. Bagi desa yang menganggarkan kegiatan pembangunan infrastruktur agar diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembiayaan kegiatan padat karya tunai dengan mengacu pada pagu anggaran tahun sebelumnya.
3. Penggunaan Dana Desa agar dapat diprioritaskan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, home industri dan pariwisata dengan pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan model usaha ekonomi masyarakat dan atau usaha ekonomi desa.
4. Lembaga kemasyarakatan desa seperti TP.PKK, LPM, Karang Taruna diarahkan untuk melaksanakan program/kegiatan usaha ekonomi produktif.
5. Kegiatan pelayanan dasar agar tetap dianggarkan utamanya penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi untuk anak-anak dilakukan dalam kegiatan posyandu dan pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD).
6. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019.
7. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
8. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

9. Perencanaan penganggaran APBDesa yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait.
10. Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila:
 - a. telah melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan
 - b. ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.
11. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor dan bangunan lainnya, harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah berupa Sertifikat atau Akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
12. Pengadaan Tanah; dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim independent/diluar desa yang dibentuk oleh Camat.
13. Pembayaran Insentif kepada Staf Pengolah Data, Bendahara Desa, Petugas Jaga Desa, Staf kebersihan, Matri Tani Desa, staf pelayanan umum dan staf sekretariat BPD dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan melalui pemindahbukuan rekening (Non-Tunai).
14. Standar Satuan Harga Untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Narasumber di Desa dapat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pelaksana Kegiatan ;
 - 1) Untuk kegiatan mulai Rp. 5.000.000 s.d. 10.000.000,- Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - Penanggungjawab : 300.000,-
 - Ketua : 250.000,-
 - Sekretaris : 200.000,-
 - Anggota 2 org : 150.000,-
 - 2) Untuk kegiatan lebih dari 10.000.000,- Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - Penanggungjawab : 600.000,-
 - Ketua : 500.000,-
 - Sekretaris : 400.000,-
 - Anggota 2 org : 300.000,-
 - b. Belanja Lainnya :

Belanja lainnya di luar point 1) dan 2) di atas sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 905/Kep.463-Adm.Pemb/2018 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 dengan menyesuaikan harga lokal Desa.

15. Nama-Nama Pengelola Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, BPD dan Pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa adalah yang tercantum dalam Sistem Informasi Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak (Website KMPDes) dan digunakan dalam pengurusan perbankan.
16. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPJDesa) diupload dalam Website Desa dengan alamat www.desalebak.web.id.
17. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 diinformasikan dalam Baligo yang dipasang di depan Kantor Desa.
18. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat *Training of Trainer* atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.
19. Operasional dan Tunjangan BPD dapat dibayarkan apabila BPD telah melaporkan kegiatan rutin 3 bulanan.
20. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa yang merupakan Anggaran Penyertaan Modal. Penyaluran Anggaran Desa dilakukan kepada Rekening BUMDesa setelah dilakukan verifikasi tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten.
21. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan kegiatan yang pembayarannya direncanakan di atas bulan Oktober.
22. Kegiatan pelatihan bagi Kepala Desa, perangkat desa, staf desa dan pimpinan dan anggota BPD dilakukan dengan pola pengiriman kepada lembaga pemerintah yang berwenang atau lembaga non pemerintah yang berbadan hukum, melakukan laporan pajak tahunan dan telah dilakukan audit dari lembaga akuntan publik secara berkala, memenuhi kewajiban membayar pajak setiap tahun dibuktikan dengan laporan pajak tahunan, penyelenggara telah memiliki sertifikat manajemen of training, narasumber telah memiliki sertifikat training of trainer kecuali bagi pejabat struktural yang karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
23. Untuk kegiatan pelatihan masyarakat di desa narasumbernya telah memiliki serttifikat keahlian sesuai dengan bidang tugasnya atau pejabat struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecuali kegiatan pelatihan masyarakat yang jumlahnya tidak memenuhi kuota satu kelas (minimal 10 orang) dilakukan dengan cara pengiriman peserta dengan ketentuan sesuai dengan poin 22 di atas.
24. Pengadaan barang dan jasa di desa dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang di desa meliputi pengadaan sarana prasarana kerja, pengadaan material untuk pembangunan sarana kerja dan pengadaan

barang dan jasa bidang pertanian, berkebunan, peternakan, perikanan dan industri kecil.

25. Menindaklanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa dimaksud perlu dilakukan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;
 - b. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah desa dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 yang meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran desa.
26. Setiap penyusunan kegiatan dalam APBDesa wajib melakukan koordinasi dengan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang berkedudukan sebagai pendamping teknis.
27. Tunjangan tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa yang bersumber dari PADes yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
28. BPD dapat diberikan tunjangan kedudukan yang layak yang bersumber dari PADes.

a. Contoh Format Peraturan Desa tentang APBDesa 2019

**PERATURAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN LEBAK**

NOMOR.....

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**



PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2018



KEPALA DESA KEC.....
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2018

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.
2.	Belanja Desa	<u>Rp.</u>
	Surplus / Defisit	Rp.
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di.....
pada Tanggal.....

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEC.....
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2	3		4	5
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	1				Pendidikan	
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	
2	1	05	5	3	Belanja Modal	
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa	
5	1				Penanggulangan Bencana	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	1				Keadaan Darurat	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
		dst				
					JUMLAH BELANJA	
					SURPLUS / (DEFISIT)	
			6		PEMBIAYAAN	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
					SELISIH PEMBIAYAAN	

....., 2018

KEPALA DESA

.....

b. *Format Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*



KEPALA DESA KEC.....
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2018

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Desa Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa..... Tahun 2018 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Pendapatan Desa | |
| | a. Pendapatan Asli Desa | Rp. |
| | b. Transfer | Rp. |
| | c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp. |
| | Jumlah Pendapatan | Rp. |
| 2. | Belanja Desa | |
| | a. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa | Rp. |
| | b. Bidang Pembangunan | Rp. |

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus / Defisit	Rp.
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di.....
pada Tanggal.....

SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
 2019.

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEC.....
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING				URAIAN				KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
VOL.		SATUAN		4		5		6			
1	2			3				4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				
			4	3	1	<Obyek Pendapatan>				
							dst...				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>				
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan				
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
							<Rincian Obyek Belanja>				
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	1						Pendidikan				

2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar				
2	1	05	5	3			Belanja Modal				
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan				
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>				
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
5	1						Penanggulangan Bencana				
5	1	00					Penanggulangan Bencana				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	0		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	0	00	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS /(DEFISIT)				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
		ds									
		t									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

.....,

Kepala Desa,

(.....)

**RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN 2019**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

NO	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Vol.	Satuan	Biaya (Rp.)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang melaksanakan kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Kegiatan						Jumlah	Laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Desa																	
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan																	
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat																	
Jumlah Per Bidang 4																		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																	

Kepala Desa

.....
Sekretaris Desa

.....

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 PEMERINTAH DESA KEC.....
 TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang :
 2. Sub Bidang :
 3. Kegiatan :
 4. Waktu Pelaksanaan : 1 Januari – 31 Desember 2019

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan
 Kepala Desa

.....,

Kepala Seksi/Kaur

.....,

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING				URAIAN				ANGGARAN (Rp.)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	JUMLAH (Rp.)
1		2		3				4	5												6
a	b	c	a	b	c	d															

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa

.....
Kaur Keuangan

(.....)

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

(.....)

(.....)

c. Tahapan Kegiatan dan Jenis Dokumen Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

TAHAPAN KEGIATAN DAN JENIS DOKUMEN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEGIATAN	JENIS DOKUMEN	WAKTU	KET
1.	Penyusunan Rancangan APBDesa TA. 2019 oleh Sekretaris Desa	a. Rancangan APBDesa TA.2019; b. Pembahasan dengan Pelaksana / Lembaga Kemasyarakatan	1 minggu	
2.	Laporan Sekdes Kepada Kepala Desa dengan Lampiran Nota Dinas Dan Dokumen Rancangan APBDesa TA. 2019	a) Nota Dinas Laporan dari Sekdes Kepada Kepala Desa; b) Draft Rancangan APBDesa TA. 2019	1 Hari	
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa TA. 2019	a) Surat Pengantar dari Kepala Desa Kepada Pimpinan BPD; b) Draft Rancangan APBDesa TA. 2019	1 Hari	
4.	Rapat Musyawarah Persiapan Pembahasan APBDesa TA. 2019	Surat Undangan, Berita Acara & Lampiran Berita Acara	1 hari	
5.	a) Rapat Paripurna I (Pembahasan Rancangan APBDesa 2019 Antara BPD dengan Pemerintah Desa; b) Rapat Musyawarah Desa Oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa (Penetapan APBDesa TA. 2019 dan Uji Publik); c) Rapat Paripurna II, (Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD Tentang Kesepakatan APBDesa TA. 2019 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa).	a) Surat Undangan Rapat Paripurna I, Daftar Hadir Paripurna I, Berita Acara Paripurna I dan Visualisasi Acara Paripurna I; b) Surat Undangan Musdes (Uji Publik), Daftar Hadir Musdes, Berita Acara Musdes dan Visualisasi Acara Musdes; c) Surat Undangan Paripurna II, Daftar Hadir Paripurna II, Berita Acara Paripurna II dan Visualisasi Acara Paripurna II; dan d) Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan APBDesa TA. 2018	1 hari 1 hari 1 hari	
6.	Verifikasi Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Oleh Tim Asistensi Kecamatan Yang Dibentuk Oleh Camat.	a) Surat Pengantar Kepala Desa Kepada Camat; b) Lembar Evaluasi APBDesa TA. 2019; dan c) Visualisasi Acara Evaluasi & Verifikasi APBDesa TA. 2018	1 Minggu	

7.	Pengiriman Dokumen APBDesa TA. 2019	a) Surat Pengantar Camat; b) Dokumen APBDesa TA. 2019 (Hasil Evaluasi Camat)	1 hari	
----	-------------------------------------	---	--------	--

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
PEMBAHASAN RANCANGAN
APBDesa TA. 2019

Foto – 1

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan pelaksana kegiatan/Lembaga
Kemasyarakatan

Foto – 2

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan Sekretariat Desa

Foto – 3 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan Pengurus LPM

Foto – 4 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan pengurus TP-PKK

Foto – 5 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan paguyuban Posyandu

Foto – 6 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan paguyuban RT/RW

Foto – 7 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan Karang Taruna

Foto – 8 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan pengurus BUM Desa

Foto – 9 dst

Dst.....



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

Alamat :

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK KEPALA DESA
DARI : SEKRETARIS DESA
TANGGAL : 2018
NOMOR : 910/ -Ds...../2018
PERIHAL : LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019.

DISPOSISI	ISI
	<p>Dihaturkan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dokumen terlampir.</p> <p>Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Peripurna II.</p> <p>Demikian dilaporkan, terima kasih</p>

Sekretaris Desa,

.....



PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

Alamat :

.....,2018

Kepada:

Yth. Ketua BPD

di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/...../Ds...../2018

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.

Kepala Desa

.....



BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (B P D)

Sekretariat :

....., 2018

Kepada :

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2018 Yth.
Lampiran : - di -
Perihal : Undangan Musyawarah Tempat
Persiapan Pembahasan
Rancangan APBDesa Tahun
Anggaran 2019

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal :
Pukul : WIB s/d Selesai
Tempat :
Acara : Pembahasan dan Penentuan Jadwal
Rapat-Rapat dan Anggaran
Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran
2019.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BPD
Sekretaris,

.....

Tembusan :
-. Yth. Camat

Catatan :

Peserta Rapat adalah :

1. Ketua BPD;
2. Wakil Ketua BPD;
3. Sekretaris BPD;
4. Kepala Desa; dan
5. Sekretaris Desa

BERITA ACARA RAPAT

MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : 910/BA. /PAN.MUS/2018

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2018, telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk menentukan Jadwal Rapat-Rapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2019, antara lain sebagai berikut :

- a) Rapat Paripurna I Tanggal, dengan agenda pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala Desa kepada BPD dengan DPA Terlampir;
- b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal, dengan agenda penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan RAB Terlampir;
- c) Rapat Paripurna II Tanggal, dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA BPD	1.....
2.		WAKIL KETUA	2.....
3.		SEKRETARIS BPD	3.....
4.		KEPALA DESA	4.....
5.		SEKRETARIS DESA	5.....

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH
 PERSIAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA
 TAHUN ANGGARAN 2019.

Nomor : 910/BA. /Pan.Mus/2018

Tanggal :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
 KEGIATAN PARIPURNA I, MUSYAWARAH DESA DAN PARIPURNA II
 PEMBAHASAN RANCANGAN**

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
A. PARIPURNA I				
B. MUSYAWARAH DESA				
C. PARIPURNA II				
JUMLAH (Rp.)				

KETUA BPD

.....



BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (B P D)

Sekretariat :

....., 2018

Kepada :

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2018
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna I,
Penyampaian dan Pembahasan
APBDesa TA. 2019

Yth.

di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal :
Pukul : WIB s/d Selesai
Tempat :
Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2019 oleh Kepala Desa didampingi oleh perangkat desa;
3. Pembahasan dan Tanya Jawab;
4. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

- Yth. Camat

Catatan :

Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I**

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Anggota BPD	6.
7.		Sekretaris Desa	7.
8.		Kasi Pemerintahan	8.
9.		Kasi Ekbang	9.
10.		Kaur Umum	10.
11.		Kaur Keuangan	11.
Dst.			

....., 2018
Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA I
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : 910/BA. /BPD/2018

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2018, telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala Desa kepada BPD,

Demikian berita acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.
3.		SEKRETARIS	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
6.		ANGGOTA	6.
7.		ANGGOTA	7.
8.		ANGGOTA	8.
9.		ANGGOTA	9.
10.		KEPALA DESA	10.
11.		SEKDES	11.
Dst..			

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA I

PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

Foto – 1

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2019 antara BPD dengan Pemerintah Desa

Foto – 2

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2019 antara BPD dengan Pemerintah Desa

Foto – 3

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2019 antara BPD dengan Pemerintah Desa



BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (B P D)

Sekretariat :

....., 2018

Kepada :

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2018 Yth.
Lampiran : - di -
Perihal : Undangan Rapat Musyawarah Tempat
Desa (MUSDES) Tentang
Penyampaian Rancangan
APBDesa TA. 2019

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2019, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal :
Pukul : WIB s/d Selesai
Tempat :
Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Kepala Desa
3. Sambutan Camat
4. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2018 oleh Kepala Desa;
5. Tanya Jawab dan Uji Publik;
6. Penutup

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :
-. Yth. Camat

DAFTAR HADIR
RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

Desa Kecamatan

Tanggal 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Sekretaris Desa	6.
7.		Kasi Pemerintahan	7.
8.		Kasi Ekbang	8.
9.		Kaur Umum	9.
10.		Kaur Keuangan	10.
11.		Bendahara	11.
12.		Staf Desa	12.
13.		Staf Desa	13.
14.		Linmas Desa	14.
15.		Linmas Desa	15.
16.		Ketua TP-PKK	16.
17.		Ketua Paguyuban RT/RW	17.
18.		Ketua LPM	18.
19.		Ketua Karang Taruna	19.
20.		Ketua Paguyuban Posyandu	20.
21.		Ketua BPSPAMS	21.
22.		Ketua BUMDes	22.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
23.		Ketua Pengurus Pasar Desa	23.
24.		Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	24.
25.		Tokoh Agama	25.
26.		Tokoh Agama	26.
27.		Tokoh Agama	27.
28.		Tokoh Adat	28.
29.		Tokoh Adat	29.
30.		Tokoh Masyarakat	30.
31.		Tokoh Masyarakat	31.
32.		Tokoh Masyarakat	32.
33.		Tokoh Pendidik	33.
34.		Tokoh Pendidik	34.
35.		Tokoh Pendidik	35.
36.		Perwakilan Kelompok Tani	36.
37.		Perwakilan Kelompok Tani	37.
38.		Perwakilan Kelompok Tani	38.
39.		Perwakilan Kelompok Perajin	39.
40.		Perwakilan Kelompok Perajin	40.
41.		Perwakilan Kelompok Perajin	41.
42.		Perwakilan Kelompok Perempuan	42.
43.		Perwakilan Kelompok Perempuan	43.
44.		Perwakilan Kelompok Perempuan	44.
45.		Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak	45.
46.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	46.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
47.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	47.
48.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	48.
49.		Perwakilan Kelompok Nelayan	49.
50.		Perwakilan Kelompok Nelayan	50.
51.		Masyarakat Lainnya	51.
52.		Masyarakat Lainnya	52.
53.		Masyarakat Lainnya	53.
54.		Masyarakat Lainnya	54.
55.		Masyarakat Lainnya	55.
56.		Masyarakat Lainnya	56.
57.		Masyarakat Lainnya	57.
58.		Masyarakat Lainnya	58.
59.		Masyarakat Lainnya	59.
60.		Masyarakat Lainnya	60.
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA

**PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR : 910/BA.MUSDES/BPD/2018

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2018, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.
3.		SEKRETARIS	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
6.		ANGGOTA	6.
7.		ANGGOTA	7.
8.		ANGGOTA	8.
9.		ANGGOTA	9.
10.		KEPALA DESA	10.
11.		SEKDES	11.
Dst..			

VISUALISASI & DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA

Foto – 1

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2019

Foto – 2

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2019

Foto – 3

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2019



PEMERINTAH DESA
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA
(B P D)

Sekretariat :

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2018
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna II

Kepada :
Yth.
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2019 dan Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2019, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal :
Pukul : WIB s/d Selesai
Tempat :
Susunan Acara :

1. Pembukaan.
2. Laporan Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) oleh BPD.
3. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
4. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD);
5. Penandatanganan Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa TA. 2019 menjadi APBDesa TA. 2019;
6. Sambutan Kepala Desa;
7. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :
-. Yth. Camat

s.

Catatan :
Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II**

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD, PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN APBDESA TAHUN ANGGARAN
2019 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Wakil Ketua BPD	3.
4.		Sekretaris BPD	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.
8.		Anggota	8.
9.		Anggota	9.
10.		Anggota	10.
11.		Sekdes	11.
12.		Kasi Pemerintahan	12.
13.		Kasi Ekbang	13.
14.		Kaur Umum	14.
15.		Kaur Keuangan	15.
16.		Bendahara Desa	16.
17.		Ketua LPM	17.
18.		Ketua Karang Taruna	18.
19.		Ketua TP-PKK	19.
20.		Ketua Paguyuban Posyandu	20.
21.		Ketua Paguyunan RT/RW	21.
22.		Ketua BUMDes	22.
23.		Ketua BP-SPAMS	23.
24.			24.

....., 2018
Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II
PENETAPAN RANCANGAN APBDESA TA. 2019
MENJADI APBDESA TA. 2019

NOMOR : 910/BA. /BPD/2018

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2018, telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa.

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.
3.		SEKRETARIS	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
6.		ANGGOTA	6.
7.		ANGGOTA	7.
8.		ANGGOTA	8.
9.		ANGGOTA	9.
10.		KEPALA DESA	10.
11.		SEKDES	11.
Dst..			

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA II

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA, PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN APBDESA
DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

Foto – 1

Acara Rapat PARIPURNA II (Laporan Panitia MUSDES)

Foto – 2

Acara Rapat PARIPURNA II (Penandatanganan Keputusan
BPD ttg Kesepakatan APBDesa TA. 2019)

Foto – 3

Acara Rapat PARIPURNA II (Penyerahan Sambutan Tertulis
Kepala Desa Tentang APBDesa TA. 2019)



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

- Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Paripurna II yang dilaksanakan pada Tanggal 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa.....menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDESA) DesaKecamatan.....Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 20... menjadi Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) DesaKecamatan.....Kabupaten Tahun Anggaran 20...
- KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) berimbang pada Rp. (.....Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp.</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. |
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Pada Tanggal : 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Ketua,

.....

BUPATI LEBAK,
Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA